KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Penyelenggaraan pemilu, voting menggelinding di Paripurna,konsistensi parpol terpeta
Tanggal : Sabtu, 15 Juli 2017
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

RUU Penyelenggaraan Pemilu

Voting Menggelinding di Paripurna, Konsistensi Parpol Terpeta

[JAKARTA] Pansus RUU Pemilu sudah menyiapkan kemungkinan, bila musyawarah dan mufakat tak tercapai, maka pemilihan suara terbanyak (*voting*) dilakukan di rapat paripurna DPR 20 Juli menyangkut lima paket isu krusial RUU tersebut.

Kata Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarulzaman, dalam lobi terakhir Pansus tadi malam (13/7), disepakati akan memakai cara sesuai UU MD3 bila hendak *voting*.

"Nanti cara *voting*-nya adalah dilakukan secara terbuka, dan *one man one vote*. Itu sudah disepakati," kata Rambe, Jumat (14/7).

Dia menegaskan, pihaknya tak khawatir apabila jalan voting dilaksanakan. Diyakininya, voting secara individu anggota dewan itu takkan menggerus suara anggota masing-masing fraksi yang berada di sisi Pemerintah seperti Golkar, PDI-P, Nasdem, Hanura, dan PPP.

Menurut dia, anggota fraksi-fraksi itu takkan mungkin memilih pilihan berbeda dengan pilihan fraksi yang sejalan dengan pilihan Pemerintah. Sebab para anggota fraksi pasti akan berdisiplin serta beretika.

"Kami yakin anggota kami berdisiplin dan beretika. Kalaupun *one man one vote*, *ya kan* ada disiplin itu. Tak ada sikap pribadi dalam konteks isu RUU Pemilu seperti ini," kata Rambe.

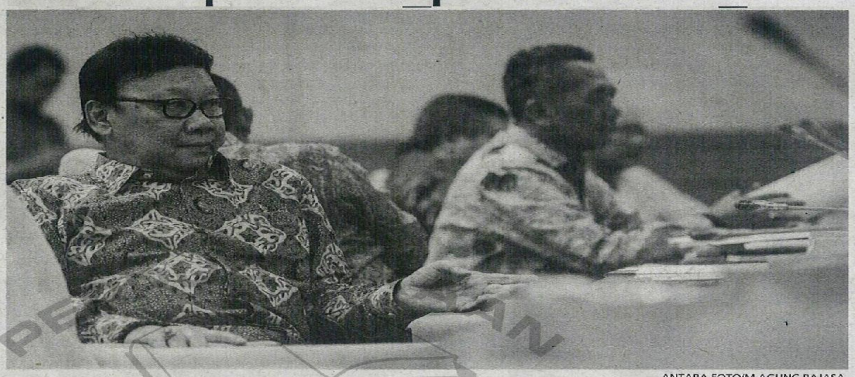

ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Rapat kerja tersebut mengagendakan pengambilan keputusan mengenai lima paket isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Karena yakin semua berdisiplin dan beretika, Rambe menegaskan keyakinan dirinya bahwa pihaknya akan mayoritas bila diadakan voting di paripurna 20 Juli. Sejauh ini, fraksi yang jelas-jelas sejalan dengan pemerintah dan berkoalisi memilih Paket A dari lima paket yang disiapkan adalah berjumlah lima. Yakni PDI-P (109 kursi), Golkar (91), PPP (39), Nasdem (36), dan Hanura (16). Ditotal jumlah anggotanya adalah 291. Sementara total jumlah anggota dewan bila semuanya hadir adalah 560 orang.

"Yang penting kesepakatan kami, lima fraksi sudah tegas paket A. Fraksi lain, *ya* kita coba dulu usahakan musyawarah dan mufakat," katanya.

Ada lima opsi paket yang akan dibawa untuk menyelesaikan lima isu krusial. Kelima paket itu adalah sebagai berikut:

Paket *pertama* dengan *presidential threshold* (Pres-T) 20-25%; *parliamentary threshold* (PT) 4 persen, sistem pemilu terbuka, sebaran kursi daerah pemilihan (dapil) 3-10; dan metode konversi suara Sainte Lague murni.

Paket *kedua*, isinya Pres-T 0%; PT 4%; sistem pemilu terbuka, sebaran 3-10 kursi per dapil; metode kuota hare.

Paket *ketiga*, Pres-T 10-15%: PT 4%, sistem pemilu terbuka; sebaran kursi 3-10; metode kuota hare.

Paket *keempat*, Pres-T 10-15%; PT 5%; sistem pemilu terbuka; sebaran kursi 3-8; metode Sainte Lague murni.

Paket *kelima*, Pres-T 20-25%; PT 3,5%; sistem pemilu terbuka; sebaran kursi 3-10; metode kuota hare.

UU Lama

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, mekanisme pengambilan keputusan terhadap isu krusial RUU Pemilu sudah tidak memungkinkan kembali ke UU lama. Sebab, apabila ingin menggunakan UU lama maka pasal-pasal dan format dalam RUU Pemilu harus diganti.

Menurut Lukman Edy, UU Pemilu nantinya merupakan penyatuan tiga UU, yakni Penyelenggara Pemilu, Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

"Kalau pemerintah hendak kembali ke UU lama maka pasal demi pasal diganti. Ini *kan* Pemilu seren-

tak sehingga formatnya harus diganti juga," katanya, Sabtu (15/7).

Ia menjelaskan, bila menggunakan UU lama maka tahapan-tahapan pemilu yang ada berbeda pada setiap UU. Sehingga, tak relevan jika digunakan pada Pemilu 2019 di mana Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak.

Oleh karena itu, pemerintah mau tidak mau menyetujui salah satu opsi paket isu krusial RUU Pemilu pada rapat paripurna, Kamis (20/7) mendatang. Lukman berpandangan pemerintah tak perlu pesimistis usulannya tidak diakomodir.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sikap pemerintah soal ambang batas pencalonan presiden 20% bertujuan menjegal calon presiden tertentu. Untuk itu, Gerindra tetap konsisten agar ambang batas pencalonan presiden dihapuskan.

Partai Gerindra, kata Muzani, telah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain agar usulan tersebut disepakati. Dia juga berharap pengambilan keputusan 5 paket isu krusial diputuskan tanpa *voting*. [MJS/H-14]